

Transparansi, Akuntabilitas, dan Opini Audit: Cerminan Tata Kelola Daerah di Indonesia

Zahra Nurani^{1*}, Muhammad Din², Masruddin³, dan Rahma Masdar⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tadulako, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciencies is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 09 November 25
Final Revision: 17 November 25
Accepted: 21 November 25
Online Publication: 31 December 25

KEYWORDS

Budget Transparency, Fiscal Accountability, Audit Opinion, Provincial Government, Good Governance

ABSTRACT

This study examines the influence of budget transparency and fiscal accountability on audit opinions of provincial governments in Indonesia. Using a quantitative approach with 34 provinces as analysis units and official secondary data (BPK opinion on LKPD, APBD transparency index/category, and SAKIP score), the variables are operationalized on an ordinal/interval scale (WTP=4 to TMP=1; SAKIP C=1 to A=5). The analysis was conducted using multiple linear regression in SPSS, preceded by a classical assumption test. The test results show that the data are normally distributed ($K-S p=0.322$), there is no heteroscedasticity (random scatterplot), and there is no autocorrelation ($DW=1.747$ between $dU=1.59$ and $4-dU=2.41$). The estimation equation is: $Y = 2.486 + 0.787X_1 + 0.546X_2$. Partially, budget transparency has a significant positive effect on audit opinion ($t=4.013$; $p<0.001$), and fiscal accountability (SAKIP) also has a significant positive effect ($t=4.230$; $p<0.01$). The model has an Adjusted $R^2=0.393$, indicating that 39.3% of the variation in audit opinion is explained by both variables, with $R=0.656$. The findings support the hypothesis that increased fiscal transparency and accountability increase the chances of obtaining an Unqualified Opinion (WTP). Policy implications emphasize the importance of digitalizing reporting, strengthening internal control, and increasing human resource capacity to strengthen fiscal governance and the credibility of regional financial reports.

KATA KUNCI

Transparansi Anggaran, Akuntabilitas Fiskal, Opini Audit, Pemerintah Provinsi, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas fiskal terhadap opini audit pemerintah provinsi di Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis 34 provinsi dan data sekunder resmi (opini BPK atas LKPD, indeks/kategori transparansi APBD, dan skor SAKIP), variabel dioperasionalisasi dalam skala ordinal/interval (WTP=4 sampai dengan TMP=1; SAKIP C=1 s.d. A=5). Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda di SPSS, diadahului uji asumsi klasik. Hasil uji menunjukkan data berdistribusi normal ($K-S p=0.322$), tidak terdapat heterokedastisitas (scatterplot acak), dan tidak ada autokorelasi ($DW=1.747$ di antara $dU=1.59$ dan $4-dU=2.41$). Persamaan estimasi: $Y = 2.486 + 0.787X_1 + 0.546X_2$. Secara parsial, transparansi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit ($t=4.013$; $p<0.001$), dan akuntabilitas fiskal (SAKIP) juga berpengaruh positif signifikan ($t=4.230$; $p<0.01$). Model memiliki $Adjusted R^2=0.393$, yang mengindikasikan 39.3% variasi opini audit dijelaskan oleh kedua variabel, dengan $R=0.656$. Temuan mendukung hipotesis bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal meningkatkan peluang pemerolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Implikasi kebijakan menekankan pentingnya digitalisasi pelaporan, penguatkan pengendalian internal, dan peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat tata kelola fiskal dan kredibilitas laporan keuangan daerah.

CORRESPONDING AUTHOR

zahranurani256@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v8i1.281

1. Pendahuluan

Kualitas pengelolaan keuangan publik merupakan prasyarat tata kelola daerah yang baik. Di Indonesia, pemerintah provinsi wajib menerapkan transparansi dan akuntabilitas agar anggaran dikelola secara efisien, efektif, dan sesuai hukum [1]. Transparansi memastikan akses publik terhadap informasi perencanaan, alokasi, dan realisasi belanja; akuntabilitas menuntut pelaporan kinerja keuangan yang akurat dan tepat waktu. Opini audit BPK menjadi indikator utama kualitas pelaporan: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencerminkan

kepatuhan penuh terhadap standar akuntansi, sedangkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW/Adverse), atau *Disclaimer* menunjukkan kelemahan dalam pelaporan, pengendalian internal, atau kepatuhan. Meskipun reformasi (UU 17/2003; UU 23/2014) telah memperkuat kerangka hukum, kualitas pelaporan antarprovinsi tetap bervariasi. Kondisi ini menegaskan perlunya pengujian empiris atas peran transparansi dan akuntabilitas fiskal sebagai determinan hasil audit pemerintah provinsi.

Studi-studi sebelumnya telah memberikan bukti yang beragam mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap opini audit. Misalnya, terdapat penelitian yang menemukan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas saja mungkin tidak menjamin hasil tata kelola yang lebih baik [2]. Di sisi lain, penelitian berbeda menunjukkan bahwa temuan audit dan opini audit berinteraksi secara kompleks yang dapat memengaruhi integritas sektor publik [3]. Temuan-temuan ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut yang berfokus secara khusus pada pemerintah provinsi, dengan menggunakan data yang lebih baru dan memasukkan transparansi serta akuntabilitas fiskal sebagai variabel penjelas untuk opini audit.

Pentingnya transparansi juga telah ditekankan dalam studi internasional, di mana praktik anggaran terbuka dikaitkan dengan peningkatan kinerja fiskal dan pengurangan korupsi [4]. Negara-negara yang menyediakan informasi anggaran yang tepat waktu dan komprehensif cenderung menikmati kepercayaan publik yang lebih besar dan disiplin keuangan yang lebih kuat. Di Indonesia, beberapa provinsi telah mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan transparansi, seperti menerbitkan dokumen anggaran secara daring dan mengadakan konsultasi publik mengenai rancangan anggaran. Namun, tingkat transparansi masih sangat bervariasi antarprovinsi, yang menciptakan peluang untuk menguji secara empiris apakah perbedaan ini memengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK. Demikian pula, akuntabilitas fiskal merupakan konsep multidimensi yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap standar pelaporan. Konsep ini mencakup tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya secara bijaksana, menyelaraskan pengeluaran dengan prioritas pembangunan, dan menanggapi rekomendasi audit secara tepat waktu. Evaluasi kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan ukuran akuntabilitas tambahan. Namun demikian, hubungan antara skor SAKIP dan opini audit belum sepenuhnya dipahami, sehingga menjadikannya subjek yang menarik untuk penyelidikan empiris lebih lanjut. [5], [6], [7]

Dari perspektif kebijakan, memahami determinan opini audit sangat relevan bagi pemerintah pusat dan daerah. Opini audit tidak hanya mencerminkan akurasi teknis laporan keuangan, tetapi juga memengaruhi hubungan antarpemerintah, transfer fiskal, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Provinsi dengan opini wajar tanpa pengecualian yang konsisten sering kali dianggap lebih kredibel dan mungkin menerima dukungan yang lebih besar dalam hal investasi dan kerja sama antarpemerintah. Oleh karena itu, mengidentifikasi bagaimana transparansi dan akuntabilitas berkontribusi pada hasil audit yang lebih

baik dapat memberikan wawasan berharga untuk memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Transparansi anggaran memiliki signifikansi penting dalam membentuk kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang selanjutnya berpengaruh terhadap opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam konteks penelitian ini transparansi anggaran diartikan sebagai salah satu fondasi utama penerapan prinsip *good governance* di sektor publik. Pemerintah daerah yang menerapkan transparansi secara konsisten akan menampilkan informasi keuangan secara terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh Masyarakat [8]. Keterbukaan ini memungkinkan adanya kontrol publik serta pengawasan dari lembaga terkait, yang mendorong aparatur pemerintah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan prinsip akuntabilitas yang tinggi [9], [10].

Peningkatan transparansi anggaran mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien, efektif, serta bebas dari praktik penyimpangan [11]. Kondisi tersebut mempermudah auditor dalam memperoleh bukti audit yang memadai dan menilai kewajaran laporan keuangan secara objektif. Sebaliknya, rendahnya tingkat transparansi sering menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan material atau pelanggaran peraturan, yang dapat menurunkan kualitas opini audit. Dengan demikian, transparansi anggaran diyakini memiliki pengaruh positif terhadap opini audit pemerintah daerah di Indonesia, di mana semakin tinggi tingkat keterbukaan anggaran, semakin besar pula peluang pemerintah daerah memperoleh opini sebagai bentuk pengakuan atas kinerja keuangan yang baik.

H1: Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap opini audit.

Secara teoritis, akuntabilitas fiskal merupakan salah satu komponen utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menuntut setiap organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [12]. Akuntabilitas fiskal menggambarkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan, dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) [13]. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), pemerintah daerah berperan sebagai *agent* yang mengelola sumber daya publik milik masyarakat sebagai *principal* [14]. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan maupun asimetri informasi, pemerintah perlu menerapkan sistem akuntabilitas fiskal yang kuat. Implementasi akuntabilitas fiskal yang baik menunjukkan adanya kepatuhan terhadap anggaran, efektivitas pengelolaan

keuangan, serta integritas dalam proses pelaporan keuangan daerah.

Tingkat akuntabilitas fiskal yang tinggi menjadi salah satu indikator penting yang digunakan auditor dalam menilai kewajaran dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sistem akuntabilitas fiskal yang baik cenderung menunjukkan pengendalian internal yang efektif, keterbukaan dalam pelaporan, serta ketataan terhadap ketentuan keuangan yang berlaku [15]. Hal ini memudahkan auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan meningkatkan keyakinan terhadap kebenaran penyajian laporan keuangan, sehingga memperbesar peluang diterbitkannya opini audit yang lebih baik. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas fiskal sering dikaitkan dengan ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran, kesalahan material, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang dapat berdampak negatif terhadap hasil audit. Oleh karena itu, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas fiskal memiliki pengaruh positif terhadap opini audit pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas fiskal yang diterapkan, semakin besar kemungkinan pemerintah daerah memperoleh opini.

H2: Akuntabilitas fiskal berpengaruh positif terhadap opini audit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mengkaji secara sistematis dampak transparansi anggaran dan akuntabilitas fiskal terhadap opini audit pemerintah provinsi di Indonesia. Studi ini berkontribusi baik secara teoretis maupun praktis: secara teoretis, dengan memperkaya debat akademis tentang determinan kualitas audit di sektor publik; dan secara praktis, dengan menawarkan rekomendasi berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan praktik pengelolaan keuangan. Pada akhirnya, temuan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas sebagai alat strategis guna mencapai hasil audit yang baik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas fiskal terhadap opini audit pemerintah daerah di Indonesia. Unit analisis adalah pemerintah provinsi tahun 2022. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia (34 provinsi) dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh provinsi selama tahun

pengamatan digunakan sebagai data penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi.

Variabel dependen adalah opini audit yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi. Variabel independen meliputi transparansi anggaran, yang diukur berdasarkan ketersediaan dan keterbukaan dokumen APBD maupun indikator keterbukaan fiskal, serta akuntabilitas fiskal, yang diukur dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PANRB. Seluruh variabel dikodekan ke dalam bentuk kuantitatif agar dapat diolah lebih lanjut menggunakan SPSS. Operasionalisasi variabel dilakukan dengan skala ordinal maupun interval. Opini audit dikategorikan sesuai tingkatan mutu (misalnya TMP=1, TW=2, WDP=3, WTP=4). Transparansi anggaran diberi skor berdasarkan indeks keterbukaan (0–100) atau kategori ordinal (*Low*=1, *Moderate*=2, *Good*=3, *Very Good*=4). Akuntabilitas fiskal (SAKIP) dipetakan sesuai peringkat (C=1, CC=2, B=3, BB=4, A=5).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan SPSS melalui beberapa tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model regresi. Setelah itu, data dianalisis dengan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh Transparansi Anggaran (X1) dan Akuntabilitas Fiskal (X2) terhadap Opini Audit (Y). Uji *t* digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen, sedangkan uji *F* digunakan untuk menguji pengaruh simultan keduanya. Terakhir, koefisien determinasi (*R*²) dihitung untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uji Asumsi Klasik

3.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dimana informasi bisa dikatakan terdistribusi secara wajar apabila nilai Asymp Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05 ataupun 5%. Berlandaskan hasil pengujian ditemukan kalau angka signifikan uji Kolmogorov-Smirnov yakni sebesar 0.322 > 0,05. Hasil membuktikan jika data terdistribusi normal. Ada pula hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Normalitas

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		34,000000
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,487923
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,524000
	<i>Positive</i>	0,524000
	<i>Negative</i>	-0,524000
Kolmogorov-Smirnov Z		0,732000
Asymp. Sig (2-tailed)		0,322000

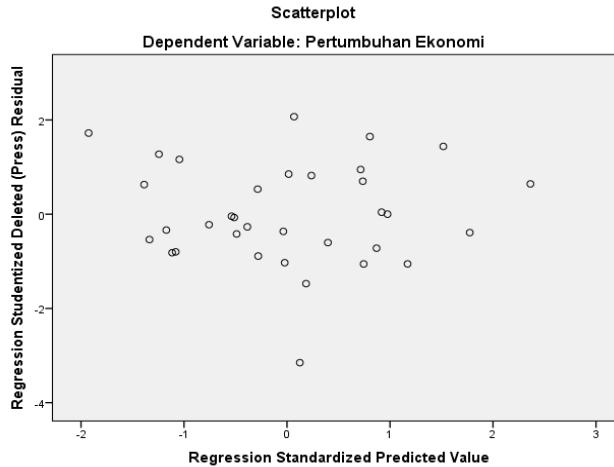
a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

3.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED

dengan residualnya (SRESID). Dasar analisis yang digunakan yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplots* pada Gambar 1, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

3.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa

nilai Durbin-Watson (DW) adalah sebesar 1,747. Karena nilai DW Anda 1,747 berada di antara dU (1,59) dan 4 – dU (2,41), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi pada model regresi dengan 34 sampel tersebut.

3.1.4. Analisis Regresi

Analisis Regresi Linear Berganda dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal terhadap Opini Audit. Berdasarkan hasil *output* dengan SPSS 21,0, terlihat hasil analisis regresi linear berganda pada Table 2.

Table 2. Analisis Regresi

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i> Beta	t	Sig
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2,486	0,388		12,453	0,000
X1_Transparan	0,787	0,255	2,434	4,013	0,000
X2_Akuntabilitas	0,546	0,241	2,861	4,230	0,010

a. Dependent Variable: Y_Opini

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 2, diperoleh persamaan regresi pada Persamaan (1).

$$Y = a + b1X1 + b2X2$$

$$Y = 2,486 + 0,787X1 + 0,546X2 \quad (1)$$

Koefisien regresi (b_1) 0,787 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan atau peningkatan Transparansi Anggaran (X_1) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan naik atau meningkatnya Opini Audit sebesar 0,787. Koefisien regresi (b_2) 0,546 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan atau peningkatan Akuntabilitas Fiskal (X_2) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan peningkatan Opini Audit sebesar 0,546.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat diinterpretasikan hasil uji-t sebagai berikut:

- a) Variabel (X_1) diperoleh t-hitung sebesar $4,013 > t$ -tabel sebesar 2,040 dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 5% yaitu $0,05 > 0,000$. Hasil ini mengindikasikan terdapat hubungan antara Transparansi Anggaran (X_1) terhadap Opini Audit.
- b) Variabel (X_2) diperoleh nilai t hitung sebesar $4,230 > t$ -tabel sebesar 2,040 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5% yaitu $0,05 > 0,01$. Hasil ini mengindikasikan terdapat pengaruh antara Akuntabilitas Fiskal (X_2) terhadap Opini Audit.

Hasil Pengolahan data menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel bebas Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Fiskal berkontribusi sebesar 39,3 % terhadap variabel Opini Audit, sedangkan sisanya 61,7 % merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam perhitungan model penelitian ini. Nilai koefisien korelasi (*multiple R*) ialah sebesar 0,656. Nilai tersebut menunjukkan korelasi variabel independen (X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (Y) adalah sebesar 65,6 %. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Fiskal terhadap Opini Audit.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Transparansi Anggaran Berpengaruh Positif terhadap Opini Audit

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel Transparansi Anggaran (X_1) sebesar 0,787 dan bermakna positif, sedangkan uji t menghasilkan t -hitung = 4,013 (t -tabel = 2,040) dengan tingkat signifikansi sangat kecil ($p < 0,05$). Secara statistik, temuan ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Audit ketika dikontrol oleh Akuntabilitas Fiskal (X_2). Temuan empiris ini konsisten dengan bukti deskriptif pada data provinsi 2018–2022, di mana provinsi yang dikategorikan memiliki tingkat *fiscal transparency* “Good” atau “Very Good” (mis. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta) cenderung mempertahankan opini WTP secara konsisten. Pola ini mendukung mekanisme teoritis, dimana transparansi mengurangi asimetri informasi antara *agent* (pemerintah daerah) dan *principal* (masyarakat/pemangku kepentingan) serta mempermudah auditor mendapatkan bukti audit yang memadai, sehingga meningkatkan keyakinan auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, baik dari segi signifikansi statistik maupun bukti lapangan lintas-provinsi, hipotesis bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap opini audit.

Secara teoritis, akuntabilitas fiskal merupakan pilar utama *good governance* yang menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik secara transparan, efisien, dan sesuai peraturan. Dalam perspektif *agency theory*, akuntabilitas fiskal berfungsi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* melalui pelaporan keuangan yang andal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) [16]. Pemerintah daerah dengan tingkat akuntabilitas fiskal tinggi biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi pelaporan yang baik, sehingga memudahkan auditor memperoleh bukti yang memadai dan meningkatkan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan [17]. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas fiskal dapat menimbulkan penyimpangan dan kesalahan material yang menurunkan kualitas opini audit. Dengan demikian, secara teoritis, semakin tinggi akuntabilitas fiskal pemerintah daerah, semakin besar peluang untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut disajikan data pendukung pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan Tingkat Transparansi Anggaran (SAKIP) terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2018–2022

Kategori SAKIP	Provinsi	Karakteristik Transparansi	Tren Opini Audit (BPK)	Pola Hubungan
A (Very Good)	7	Transparansi tinggi, laporan tepat waktu, kepatuhan terhadap SAP	WTP konsisten ≥ 3 tahun	Sangat positif
BB (Good)	8	Pelaporan cukup terbuka, kepatuhan baik	Mayoritas WTP, stabil	Positif
B (Moderate)	14	Transparansi terbatas, pengawasan internal bervariasi	WTP/WDP fluktuatif	Moderat
CC-C (Low)	2	Laporan terlambat, kontrol lemah	WTP menurun/WDP	Negatif

Tabel 3 memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi anggaran (kategori SAKIP), semakin konsisten provinsi memperoleh opini audit WTP dari

BPK. Provinsi dengan kategori A (Very Good) menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan yang kuat, sementara provinsi dengan CC–C (Low)

mengalami penurunan opini akibat lemahnya transparansi dan kontrol keuangan. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap opini audit pemerintah daerah di Indonesia [3], [18].

3.2.2. Akuntabilitas fiskal berpengaruh positif terhadap opini audit.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas fiskal (X_2) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,546 dengan nilai t -hitung sebesar 4,230 yang lebih besar daripada t -tabel (2,040) dan tingkat signifikansi sebesar $0,01 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah.

Tabel 4. Hubungan Tingkat Akuntabilitas Fiskal (SAKIP) terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2018–2022

Kategori (SAKIP)	Jumlah Provinsi	Karakteristik Tata Kelola	Tren Opini	Pola Hubungan
A (Very Good)	7	Transparansi tinggi, kepatuhan kuat	Konsisten WTP	Sangat positif
BB (Good)	8	Cukup terbuka, kepatuhan baik	Umumnya WTP	Positif
B (Moderate)	14	Transparansi terbatas, pengawasan bervariasi	WTP/WDP fluktuatif	Moderat
CC–C (Low)	2	Rendah, kontrol lemah	WTP menurun/WDP	Negatif

Secara empiris, hasil analisis data keuangan provinsi di Indonesia periode 2018–2022 menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal berpengaruh positif terhadap opini audit. Provinsi dengan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, tercermin dari disiplin pelaporan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Misalnya, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta dengan peringkat SAKIP A (Very Good) selalu meraih opini WTP selama lima tahun terakhir. Sebaliknya, provinsi dengan akuntabilitas rendah seperti Maluku Utara dan Papua (kategori CC–C) cenderung menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akibat lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur keuangan.

Data pada Tabel 4 mendukung temuan tersebut, di mana semakin tinggi kategori SAKIP, semakin baik pula opini audit yang diperoleh. Sebanyak 100% provinsi dengan SAKIP A memperoleh WTP secara konsisten, sedangkan provinsi dengan akuntabilitas rendah menunjukkan tren penurunan opini. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menjelaskan bahwa akuntabilitas fiskal berfungsi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*principal*). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat akuntabilitas fiskal, semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini audit yang baik karena laporan keuangannya dianggap andal, transparan, dan sesuai ketentuan [3], [20], [21].

Secara teoritis, hasil tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan akuntabilitas sebagai komponen utama dalam pengelolaan keuangan publik yang transparan, efisien, dan sesuai regulasi [19]. Dalam kerangka *agency theory*, pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang mengelola dana publik atas mandat masyarakat sebagai *principal*. Akuntabilitas fiskal berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi melalui pelaporan keuangan yang jujur, transparan, dan dapat diverifikasi [2]. Pemerintah daerah dengan sistem akuntabilitas yang kuat memiliki pengendalian internal yang efektif, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan disiplin dalam pelaporan keuangan, yang secara langsung meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata auditor. Berikut disajikan data pendukung pada Tabel 4.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah provinsi dengan tingkat keterbukaan anggaran dan akuntabilitas fiskal yang tinggi yang tercermin dari kategori SAKIP “Good” hingga “Very Good” cenderung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* melalui transparansi dan akuntabilitas yang kuat mampu memperkuat kredibilitas pelaporan keuangan, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta mengurangi asimetri informasi antara pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*principal*). Dengan demikian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal menjadi faktor strategis bagi pemerintah daerah untuk mencapai opini audit yang lebih baik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Daftar Rujukan

- [1] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). Yogyakarta: Andi.
- [2] Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan? *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4153–4164. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1519>
- [3] Firmansyah, I., & Wicaksono, T. (2020). Audit opinion and local government financial performance in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 2(1), 1–15
- [4] Djpk Kemenkeu RI. (2021). APBD Online – Data Keuangan Daerah. Retrieved from <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>

- [5] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022. Retrieved from <https://www.bpk.go.id>
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Retrieved from <https://www.bpk.go.id>
- [7] Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2018–2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- [8] Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–41.
- [9] Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29–45. <https://doi.org/10.22146/jkap.6847>
- [10] Zega, R., Telaumbanua, A., Bate'e, M. M., & Gulo, H. (2025). Analisis transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Utara: Studi kasus pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 361–379. <https://doi.org/10.37531/ecotab.v7i1.2997>
- [11] Simanjuntak, T. H. (2024). Audit internal terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan pemerintah daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 949–961. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1823>
- [12] Sitorus, L., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoe, W. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- [13] Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3). <https://doi.org/10.35794/eba.4.3.2016.13394>
- [14] Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan korupsi: studi di pemerintah daerah, Indonesia dari perspektif teori keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1), 40–58.
- [15] Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Nias (Studi kasus Bpkpd sebagai leading sektor pengganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1381–1389.
- [16] Mulyanto, M., Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, 6(1), 1–17.
- [17] Ananda, F. P. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Transparansi dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*.
- [18] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Report 2022. Retrieved from <https://www.menpan.go.id>
- [19] Shafitri, A., Ratman, M. N., Jufani, A. P., Aliza, S. W., & Pangestoe, W. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas APBN dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Pendekatan Studi Literatur. *Hikamatzu, Journal of Multidisciplinary*, 2(1).
- [20] Christensen, T., & Lægreid, P. (2019). Accountability and performance management in public administration reform. *Public Performance & Management Review*, 42(2), 241–264.
- [21] Darma, R., & Haryanto, J. T. (2018). Fiscal decentralization and local government performance in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), 251–266.